

suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji/wanprestasi terhadap pihak yang lain. (Huyasro dan A Anwari, 1983: 8)

Dalam pemberian garansi bank terdapat tiga pihak yaitu, pihak bank sebagai pihak yang memberikan jaminan dan disebut penjamin atau guarantor, pihak nasabah sebagai pihak yang dijamin dan disebut terjamin, serta pihak lain sebagai pihak yang menerima jaminan dan disebut penerima jaminan.

Sifat garansi bank adalah merupakan suatu perjanjian tambahan atau Accessoir, yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, garansi bank akan berakhir kalau perjanjian pokoknya berakhir. (Djumialdji, 1991 : 30)

Perjanjian antara terjamin dengan penerima jaminan itu merupakan perjanjian pokok, sedang perjanjian pihak yang memberikan jaminan merupakan perjanjian yang terikat pada perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokok sudah dipenuhi maka perjanjian penjaminan tidak lagi dapat dituntut, artinya bahwa perjanjian penjaminan tersebut menjadi hapus. Jadi, tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian penjaminan juga tidak ada. (Emmy Pangaribuan, 1986 : 4).

Garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. (Huyasro dan Achmad Anwari, 1983 : 9)

Penerima jaminan percaya terhadap garansi bank karena bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, apabila terjamin cidera janji yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan itu. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko yang timbul sebagai akibat lalainya terjamin karena resiko yang beralih ditanggung oleh bank.

Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya mengandung resiko di waktu mendatang apabila terjamin ternyata cidera janji. Juga dapat dimengerti bahwa

secara eksplisit. Juga para Imam Madzab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Mujtahidin lainnya tidak pernah memberikan fatwa hukum terhadap masalah garansi bank, karena memang pada waktu itu belum dikenal dan belum ada.

Kenyataan tersebut bukan berarti hukum Islam telah membatasi manusia hanya pada jenis-jenis akad tertentu yang merupakan akad yang dikenal pada masa permulaan Islam dan disebut di dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al Qur'an, Al Hadits dan Ijma'. Sebaliknya syariat Islam membukakan pintu bagi pemeluknya terlibat dalam berbagai perikatan dan transaksi, sehingga memungkinkan mereka mengenal jenis-jenis perikatan dan transaksi baru yang sesuai dengan tuntutan jaman. Asal saja terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang sesuai dengan aturan-aturan perikatan/transaksi dalam Islam. Misalnya syarat yang diperlukan menurut syara' yaitu adanya saling merelakan dan adanya kemauan bebas dalam akad.

Garansi bank dalam berbagai bentuknya, seperti garansi bank untuk mengikuti tender proyek, untuk penyerahan barang, untuk keperluan membayar uang muka dan lain-lainnya, di dalamnya terkandung banyak kemiripan dengan berbagai akad/transaksi dalam hukum Islam, se -

perti : Al Kafalah, Adh Dhoman, Ar Rahnu, Al Ju'alah , dan lain-lainnya. Sehingga keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah garansi bank ini sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam ?

Hal lain yang perlu dikaji adalah latar belakang timbulnya garansi bank serta adanya kontra garansi (jaminan lawan) dalam garansi bank tersebut. Hal ini dikarenakan, karena sebenarnya debitur dapat langsung menyerahkan dana/hartanya kepada krediturnya. Tetapi mengapa harus dengan/menggunakan garansi bank, padahal selain membutuhkan kontra garansi juga masih membutuhkan//membayar-biaya-biaya lainnya. Dari sini perlu diselidiki, apakah sebenarnya kelebihan dari garansi bank.

Mengenai eksistensi garansi bank sebagai perjanjian penanggungan yang bersifat tambahan (Accessoir), juga terdapat problem penting yang memerlukan kajian dan analisis yang mendetail dan seksama, karena tampak adanya penyimpangan dari konsep hukum Islam. Problem tersebut adalah, dalam memberikan penanggungan (garansi bank) -pihak bank- seakan-akan tidak tahu dan tidak mau tahu tentang perjanjian pokok yang jadi tanggungannya, baik jumlah/nilai maupun masa berlakunya. Adanya kenyataan ini akan mengundang pertanyaan

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang digunakan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, Jalan Pemuda No. 36 Surabaya. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dengan alasan :

- a. Peraturan tentang garansi bank untuk semua lembaga perbankan di Indonesia relatif sama , sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dianggap sudah representatif (mewakili) seluruh model garansi bank pada bank-bank lain.
- b. Lokasi tersebut dianggap tidak terlalu sulit untuk dijangkau.

2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah pegawai/petugas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, yaitu bagian Administrasi - kredit, karena dianggap yang paling memiliki kompetensi dan otoritas terhadap seluk beluk pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

yang diperoleh dari hasil interview, menelaah dokumen-dokumen dan mempelajari literatur - literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya selanjutnya digeneralisir sebagai suatu kesimpulan.

- b. Deduksi, yaitu mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang bersifat umum mengenai garansi bank, selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparasi, metode ini digunakan dengan cara membandingkan antara pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dengan konsep Hukum Islam (khususnya bidang Mu'amalah).